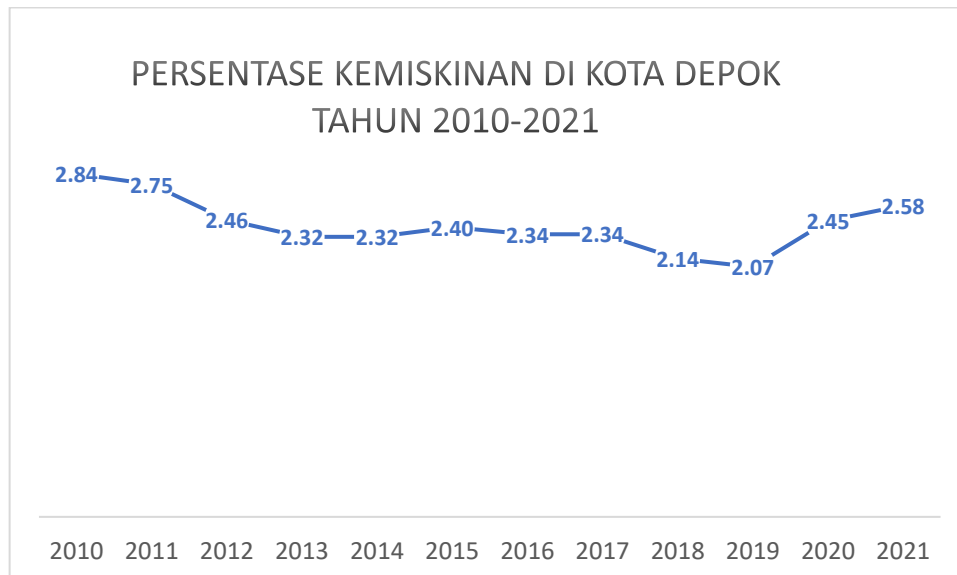


# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Kota Depok merupakan sebuah kota yang terletak di selatan kota Jakarta. Kota Depok terbentuk pada tanggal 27 April 1999, sehingga menjadikannya sebagai kota termuda di Jawa Barat. Meskipun begitu, kota Depok telah berhasil menjadi kota dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Barat. Persentase kemiskinan di kota Depok hanya berkisar di angka 2 persen (Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2022, hlm. 57). Berikut ini adalah perkembangan tingkat kemiskinan di kota Depok dari tahun 2010 hingga 2021.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Kota Depok Tahun 2010-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok, data diolah

Melalui Gambar 1. dapat diketahui bahwa grafik tingkat kemiskinan di kota Depok cenderung landai. Perkembangan kemiskinan di kota Depok terbilang stagnan karena masih terjebak di angka 2 persen. Pada tahun 2010 hingga 2019 kemiskinan menunjukkan trend menurun, namun angka tersebut kembali naik di tahun 2020 dan 2021. Kenaikan ini terjadi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini menjadi tantangan bagi kota Depok untuk kembali menurunkan angka kemiskinan di tengah kondisi pandemi seperti sekarang (Siregar, 2022).

Menurut World Bank sebagaimana yang dikutip oleh Safitri et al, adanya kemiskinan disebabkan pendapatan dan aset yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seorang manusia. Kemiskinan juga disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja dan tingkat pendidikan yang rendah (Safitri et al., 2021). Pengangguran sebagai salah satu penyebab kemiskinan juga menjadi permasalahan di kota Depok. Pada tahun 2021 jumlah pengangguran terbuka di kota Depok sebesar 117.816 orang. Jumlah ini setara dengan persentase 9,76% dari angkatan kerja (Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2022, hlm. 37). Berikut ini adalah perkembangan pengangguran di kota Depok dari tahun 2010 hingga 2021.

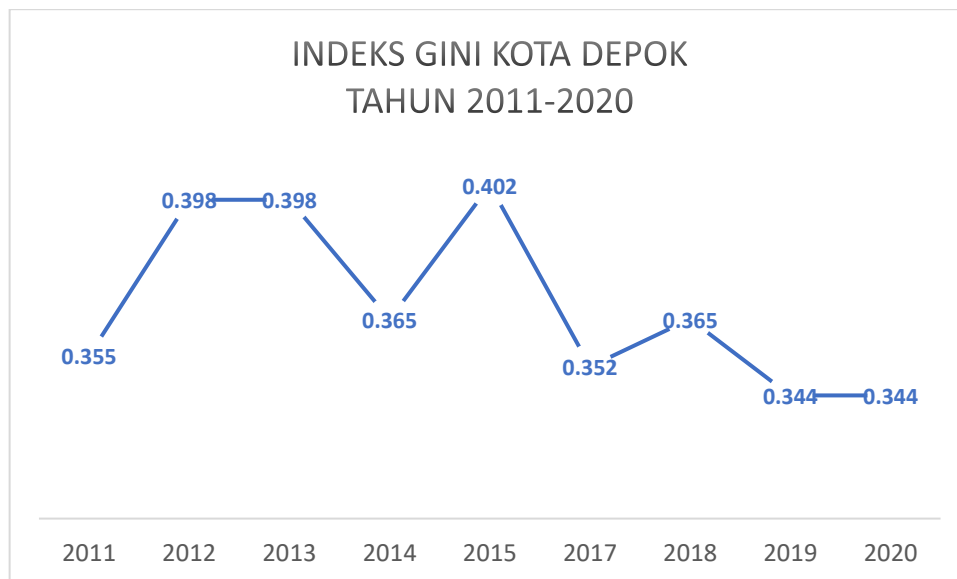


Gambar 2. Perkembangan Pengangguran di Kota Depok Tahun 2010-2021  
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok, data diolah

Perkembangan pengangguran di kota Depok cenderung mengalami penurunan. Sejak tahun 2011 hingga 2019, grafik pengangguran kota Depok mulai melandai meskipun ada kenaikan di tahun 2014. Namun, di tahun 2020, pengangguran kota Depok mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 3,76%. Pada tahun 2021, jumlah pengangguran sedikit menurun. Tak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 menjadi penyebab terjadinya kenaikan pengangguran di kota Depok. Akibat pandemi, banyak perusahaan yang harus mengurangi jumlah karyawan sehingga pengangguran meningkat. Tentu saja hal ini menjadi tantangan lain bagi kota Depok (Depokrayanews.com, 2021).

Kemiskinan dan pengangguran bila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah baru, yakni ketimpangan. Menurut penelitian yang Tasya Hadi Syahputri, 2022  
**PERAN EKONOMI BERBASIS KOMUNITAS DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: Studi Pada UKMP Depok**  
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dilakukan Hindun et al (2019) kemiskinan memiliki hubungan positif dengan ketimpangan yang artinya jika kemiskinan semakin tinggi maka ketimpangan juga semakin tinggi. Dalam kasus kota Depok, persentase kemiskinan di kota Depok tergolong rendah dengan perkembangan yang stagnan. Namun, ketimpangan di kota Depok sangat berfluktuatif. Berikut ini adalah perkembangan ketimpangan di kota Depok pada tahun 2011-2020.



Gambar 3. Indeks Gini Kota Depok Tahun 2011-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok, data diolah

Indikator dari ketimpangan dapat dilihat melalui indeks gini. Sepanjang tahun 2011 hingga 2020 indeks gini kota Depok berada dalam kategori moderat. Namun perkembangan indeks gini di kota Depok sangat fluktuatif. Hal ini menandakan bahwa kota Depok belum bisa menyelesaikan masalah ketimpangan. Bambang Pamungkas selaku Kepala Seksi Neraca dan Analisis BPS Kota Depok menyatakan bahwa ketimpangan di kota Depok disebabkan maraknya pembangunan yang bukan diperuntukkan bukan untuk masyarakat miskin dan budaya filantropis yang rendah. Rendahnya budaya filantropis menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan (Yandwiputra, 2020).

Adanya kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan menurunkan daya beli masyarakat, sementara itu pengangguran menunjukkan rendahnya tingkat produktivitas suatu daerah. Jika daya beli masyarakat dan produktivitas rendah,

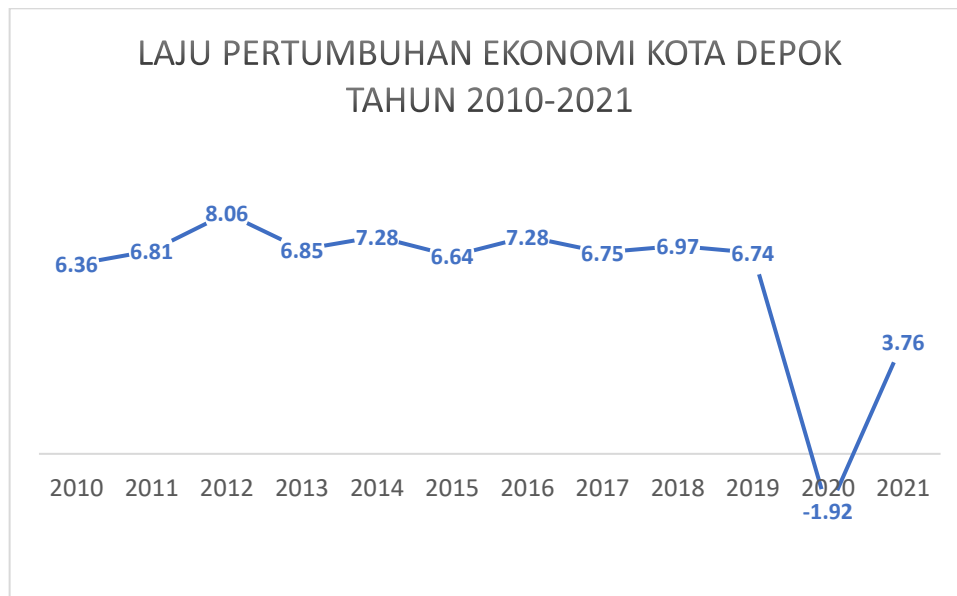
Tasya Hadi Syahputri, 2022

PERAN EKONOMI BERBASIS KOMUNITAS DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: Studi Pada UKMP Depok

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

maka pertumbuhan ekonomi akan ikut rendah. Dampaknya, pembangunan ekonomi akan terhambat (Imanto et al., 2020).



Gambar 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2010-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok, data diolah

Berdasarkan Gambar 4. pertumbuhan ekonomi kota Depok pada tahun 2010-2021 cenderung stagnan. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan kota Depok mengalami kemerosotan yang sangat tajam hingga mencapai -1,92%. Meskipun begitu, di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi meningkat lagi hingga berada di angka 3,76%. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan ini tidak berbeda jauh dengan perkembangan kemiskinan yang juga stagnan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota Depok. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan ini menandakan bahwa kinerja perekonomian kota Depok belum berkembang dengan baik karena Depok belum mampu untuk meningkatkan perekonomiannya secara bertahap.

Melalui indikator-indikator perekonomian di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan ekonomi di kota Depok masih stagnan. Idealnya, perkembangan ekonomi suatu daerah harus terus meningkat setiap tahunnya sehingga tingkat kesejahteraan dapat meningkat. Terlebih, kota Depok memiliki target-target ekonomi seperti laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,55%, indeks gini sebesar 0,35 dan angka pengangguran sebesar 8,16%. Target-target tersebut tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 yang Tasya Hadi Syahputri, 2022

**PERAN EKONOMI BERBASIS KOMUNITAS DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: Studi Pada UKMP Depok**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016. Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus bagi kota Depok jika ingin RPJPD tersebut terealisasi.

Pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak akan mencapai hasil yang optimal jika hanya bergantung kepada pemerintah. Masyarakat harus turut serta dalam upaya pembangunan ekonomi sebab masyarakat adalah pelaku utama dan penerima manfaat dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat sebagai pelaku utama mengetahui potensi yang mereka miliki dan permasalahan apa yang dihadapi sebab masyarakat sendiri yang merasakannya. Masyarakat sebagai penerima manfaat memperoleh hasil dari pelaksanaan pembangunan ekonomi. Agar hasil yang didapat optimal, pembangunan ekonomi semestinya dimulai dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, seharusnya dilakukan penyelarasan antara metode *top down* dengan *bottom up* (Imtihan et al., 2017).

Pembangunan ekonomi dengan metode *bottom up* bisa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud di sini adalah pemberdayaan yang dimulai dari keinginan masyarakat itu sendiri. Artinya, masyarakat memiliki keinginan untuk berkembang, lalu masyarakat yang mengupayakan agar dirinya bisa berkembang. Pemerintah dapat berperan sebagai *support* dalam upaya yang dilakukan masyarakat (Agustana, 2020).

Pemberdayaan memiliki peran besar dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat. Melalui pemberdayaan, masyarakat bisa memperoleh *skill* baru dan kesempatan untuk bekerja sehingga masyarakat bisa meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik lagi. Pemberdayaan juga dapat meningkatkan pengetahuan, kemandirian, kreativitas dan inovasi pada diri masyarakat (Triatmanto et al., 2020). Keberhasilan pemberdayaan dapat terlihat dari tumbuhnya kemandirian dalam masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan berdaya jika masyarakat tersebut terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan, dalam artian masyarakat memiliki akses untuk sistem sumber, penggunaan teknologi, kepemilikan modal dan sumber-sumber informasi. Pemberdayaan masyarakat akan menciptakan masyarakat yang mandiri dan siap menghadapi berbagai tantangan tanpa bantuan dari pemerintah (Ramadhani, 2020).

Upaya pemberdayaan masyarakat secara *bottom up* dapat dilakukan melalui peran komunitas. Komunitas berperan menjadi wadah masyarakat untuk menyalurkan ide atas kesamaan yang dimiliki. Melalui komunitas masyarakat bisa mendapatkan jaringan sosial yang lebih luas dan ilmu-ilmu baru. Komunitas memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sebab komunitas dibentuk atas dasar solidaritas dan tolong menolong (Wibawa & Andriani, 2017).

Peran komunitas dalam pemberdayaan adalah untuk menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Keterlibatan komunitas dalam pemberdayaan dapat membangun konstruksi sosial politik yang positif pada masyarakat dengan meningkatkan proses musyawarah dan gotong royong. Melalui komunitas pula pemberdayaan bersifat spesifik terhadap keunggulan yang dimiliki masyarakat setempat sehingga kapabilitas yang dihasilkan lebih optimal (Firman, 2021). Saat masyarakat suatu daerah meningkatkan kapabilitasnya maka akan tercipta kemandirian dalam masyarakat tersebut. Masyarakat yang mandiri akan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya sehingga terciptalah masyarakat yang produktif. Semakin produktif suatu masyarakat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat lalu terciptalah kesejahteraan. Seperti yang sudah diketahui bahwa meraih kesejahteraan merupakan tujuan utama dalam perekonomian (Baihaqi et al., 2020).

Dalam kajian ekonomi modern dikenal istilah ekonomi berbasis komunitas. Ekonomi berbasis komunitas adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada kekuatan anggota komunitas dengan asas mutualisme dan kekeluargaan (*brotherhood*) dalam rangka membangun ekonomi melalui sumber daya lokal (Wibawa & Andriani, 2017). Namun, dalam teori klasik ilmu Ekonomi Islam, kajian mengenai komunitas dan hubungannya dengan perekonomian telah dicetuskan oleh Ibnu Khaldun dalam teori *Ashabiyah*. Teori ini tertuang dalam kitabnya yang fenomenal, yaitu Mukaddimah.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan manusia lain sepanjang hidupnya. Manusia tidak akan bisa berbuat banyak tanpa berasosiasi dengan manusia lainnya saat ia hendak memenuhi kebutuhannya. Melalui gotong royong kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Hal ini

sudah cukup untuk menjelaskan bahwa dalam bidang ekonomi suatu komunitas harus bekerja sama dengan komunitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup (Saumantri & Abdillah, 2020).

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang peran ekonomi berbasis komunitas dalam memberdayakan masyarakat. Penelitian pertama dilakukan oleh Ramadhani (2020) di Desa Batubelubang, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan terhadap komunitas Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Kritcu BaBe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas UMKM Kritcu BaBe telah berhasil meningkatkan kapabilitas ekonomi masyarakat. Setiap bulannya anggota komunitas mendapat tambahan penghasilan bersih kurang lebih Rp1 juta. Adanya komunitas ini membantu anggotanya mengisi waktu luang sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Wibawa dan Andriani (2017) di Kota Madiun. Penelitian ini meneliti tentang implementasi sistem ekonomi berbasis komunitas pada masyarakat Madiun. Subjek penelitian ini adalah Komunitas Tahu Mekarsari di Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Hasil dari penelitian ini adalah ekonomi berbasis komunitas memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan, menumbuhkan kemandirian masyarakat serta mengurangi laju urbanisasi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ekonomi berbasis komunitas memiliki keunggulan untuk menambah keterampilan masyarakat sebagai bekal hidup, terutama pada masyarakat miskin.

Penelitian lain dilakukan oleh Putri et al (2017) di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini mengkaji tentang peran komunitas Banyumas Kreatif untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis komunitas. Peran Banyumas Kreatif meliputi peran edukasional, fasilitatif, perwakilan dan teknis. Selain itu, komunitas Banyumas Kreatif mampu mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Banyumas.

Dari ketiga penelitian di atas, ketiganya memiliki kesamaan, yaitu komunitas berperan besar dalam upaya memberdayakan masyarakat. Komunitas berperan dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat dari segi pengetahuan dan ekonomi. Kesamaan lain dari ketiga penelitian tersebut adalah ketiganya mengkaji peran ekonomi berbasis komunitas dalam tinjauan ekonomi dan pemberdayaan secara umum, bukan dalam perspektif ekonomi Islam.

**Tasya Hadi Syahputri, 2022**

**PERAN EKONOMI BERBASIS KOMUNITAS DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: Studi Pada UKMP Depok**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Penelitian mengenai komunitas dan hubungannya dengan ekonomi dalam tinjauan ekonomi Islam mayoritas berbentuk studi kepustakaan. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Saumantri dan Abdillah (2020) yang menyatakan bahwa peradaban manusia adalah perwujudan dari *ashabiyah* karena tiap komunitas harus saling bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Teori ini dapat digunakan untuk mengembangkan peradaban manusia.

Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Amin (2018) dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peradaban bergerak dari peradaban *badawah* menuju peradaban *hadarah* yang lebih komprehensif. Peradaban *hadarah* yang sudah dapat memenuhi kebutuhannya bila tidak didasari dengan pembangunan moral akan runtuh karena lahirnya kezaliman karena tiap orang berlomba-lomba ingin menguasai orang lain.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Arifqi (2019) yang mengkaji tentang pemikiran Ibnu Khaldun mengenai konsep pemberdayaan sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam. Pada penelitian ini, dipaparkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pembangunan terdiri dari tiga komponen, yakni sejarah, kerja sama antar komunitas (masyarakat) dan alam semesta. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain dalam masyarakat dengan digerakkan semangat solidaritas sehingga melahirkan kemakmuran.

Adapun penelitian tentang ekonomi berbasis komunitas dalam bentuk penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Faizah (2020) pada paguyuban dokar di daerah wisata Sunan Giri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif *ashabiyah* Ibnu Khaldun, tingkat kesejahteraan anggota paguyuban dokar masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan mereka masih menjadikan pekerjaan menarik dokar menjadi pekerjaan utama, sehingga *skill* yang mereka miliki masih kurang. Karena itu, kapabilitas mereka dalam ekonomi juga belum ada peningkatan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang di atas, dapat diketahui bahwa dalam ekonomi Islam, penelitian tentang ekonomi berbasis komunitas dalam bentuk empiris masih jarang dilakukan. Mayoritas penelitian empiris tentang ekonomi berbasis komunitas dilakukan dalam tinjauan ekonomi secara umum. Sementara itu,



tinjauan ekonomi Islam tentang ekonomi berbasis komunitas masih terbatas pada studi kepustakaan. Adanya *gap* penelitian ini membuat penulis tertarik untuk meneliti secara empiris ekonomi berbasis komunitas dalam perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan teori *ashabiyah* dari Ibnu Khaldun.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Depok karena kota Depok sebagai salah satu kota penyangga Jakarta memiliki beberapa permasalahan ekonomi yang harus dibenahi. Subjek dalam penelitian ini adalah komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Depok yang bernama Usaha Kecil Mikro Pertanian (UKMP). Komunitas UKMP dipilih sebab komunitas ini menyediakan wadah bagi warga Depok yang ingin menjual produk-produk pertaniannya dalam bentuk UMKM.

Walaupun kota Depok sudah menyandang julukan kota metropolitan, kota ini masih memiliki lahan pertanian. Namun, jumlah lahan pertanian di kota Depok tidak banyak sehingga produksi pertanian kota Depok tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Lahan pertanian di kota Depok tersebar di enam kecamatan kota Depok (Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2021, hlm. 12). Pada tahun 2021 jumlah luas panen tanaman padi di kota Depok sebesar 70,2 hektar dengan total produksi sebesar 466,53 ton. Komoditas padi menempati urutan kedua terbesar dari produksi komoditas pangan di kota Depok. Selain padi, produksi komoditas pangan kota Depok terdiri dari ubi kayu sebesar 57,9%, jagung sebesar 3,8%, kacang tanah sebesar 0,9%, dan ubi jalar sebesar 0,9%. Tak hanya komoditas pangan, komoditas pertanian lain yang ada di kota Depok meliputi sayuran dan buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias (Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2022, hlm. 128).

Komunitas UKMP memiliki perhatian khusus pada sektor pertanian kota Depok. Meskipun kota Depok memiliki lahan pertanian yang luasnya kecil, bukan berarti kota Depok tidak bisa mengembangkan sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian sehingga pengelolaan sektor ini perlu dilakukan dengan baik. Alasan lain komunitas UKMP dipilih untuk penelitian ini adalah komunitas UKMP sebagai komunitas UMKM memiliki dampak langsung terhadap perekonomian. Melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana peran ekonomi berbasis komunitas dalam memberdayakan masyarakat

sehingga dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan keahlian masyarakat.

## **I.2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada pembahasan peran ekonomi berbasis komunitas yang diterapkan pada komunitas UKMP dalam upaya memberdayakan anggotanya secara khusus dan memberdayakan masyarakat secara umum, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

## **I.3. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model ekonomi berbasis komunitas yang diterapkan dalam komunitas UKMP?
2. Bagaimana pengaruh ikatan sosial terhadap ekonomi berbasis komunitas yang diterapkan dalam komunitas UKMP?
3. Bagaimana peran ekonomi berbasis komunitas dan ikatan sosial dalam pemberdayaan masyarakat yang dirasakan anggota komunitas UKMP?

## **I.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan model ekonomi berbasis komunitas yang diterapkan dalam komunitas UKMP.
2. Untuk menjelaskan pengaruh ikatan sosial terhadap ekonomi berbasis komunitas yang diterapkan dalam komunitas UKMP.
3. Untuk menjelaskan peran ekonomi berbasis komunitas dan ikatan sosial dalam pemberdayaan masyarakat yang dirasakan anggota komunitas UKMP.

## **I.5. Manfaat Hasil Penelitian**

### **I.5.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran ekonomi

berbasis komunitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

### **I.5.2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator untuk pengembangan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi.